

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 11 Ayat 1 mengamanatkan kepada pemerintah dan pemerintah daerah untuk menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara. Terwujudnya pendidikan yang bermutu membutuhkan upaya yang kontinyu untuk selalu meningkatkan pendidikan. Peningkatan kualitas pendidikan merupakan faktor utama yang menentukan keberhasilan pembangunan bangsa. Kualitas pendidikan memiliki arti bahwa lulusan pendidikan memiliki kemampuan kompeten sehingga dapat memberikan kontribusi yang tinggi bagi pembangunan. Pendidikan memegang peranan yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM). Oleh karena itu, berbagai upaya peningkatan mutu atau kualitas pendidikan perlu terus dilakukan agar kualitas SDM benar-benar terwujud sebagaimana diharapkan.

Pada dasarnya terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi peningkatan kualitas pendidikan, antara lain: guru, siswa, materi, metode, sarana prasarana, lingkungan pendidikan, kurikulum dan biaya. Dari beberapa faktor tersebut, penulis akan mengkaji dua komponen yakni guru, sarana dan prasarana. Guru memegang peranan yang sangat penting bagi peningkatan kualitas proses dan hasil pembelajaran. Dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan Nasional, pemerintah khususnya Departemen Pendidikan Nasional berupaya melakukan berbagai perubahan dan pembaharuan sistem pendidikan. Salah satu upaya yang

sudah dan sedang dilakukan berkaitan dengan guru, yakni Lahirnya Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen dan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan, merupakan kebijakan pemerintah yang di dalamnya memuat usaha pemerintah untuk menata dan memperbaiki mutu guru di Indonesia.

Studi yang dilakukan Heyneman dan Loxley pada tahun 1983 di 29 negara menemukan bahwa di antara berbagai input yang menentukan mutu pendidikan (yang ditunjukkan oleh prestasi belajar siswa) sepertiganya ditentukan oleh guru. Lengkapnya hasil studi itu adalah: di 16 negara sedang berkembang, guru memberi kontribusi terhadap prestasi belajar sebesar 34%, sedangkan manajemen 22%, waktu belajar 18%, dan sarana fisik 26%. Di 13 negara industri, kontribusi guru adalah 36%, manajemen 23%, waktu belajar 22%, dan sarana fisik 19% (Supriadi, 1999:178).

Jalal (2007:1) mengatakan bahwa pendidikan yang bermutu sangat tergantung pada keberadaan guru yang bermutu yakni guru yang professional dan pengalaman kerja yang dimiliki guru merupakan salah satu kompetensi yang dapat mempengaruhi kompetensi profesional guru tersebut. Pengalaman kerja yang dimiliki oleh seorang guru tersebut juga menjadi penentu pencapaian hasil belajar yang akan diraih oleh siswa. Pengalaman mengajar yang cukup (>10 tahun), dalam arti waktu yang telah dilalui oleh seorang guru dalam melaksanakan tugasnya akan mendukung pencapaian prestasi belajar peserta didik yang maksimal sebagai tujuan yang akan diraih oleh sekolah. Pengalaman kerja merupakan suatu hal yang dijadikan perhatian yang tidak kalah pentingnya dalam

menentukan kompetensi profesional seorang guru. Guru yang berpengalaman akan merasa lebih mudah dalam menghadapi masalah-masalah yang dialami oleh peserta didik di sekolah.

Hampir semua bangsa di dunia ini selalu mengembangkan kebijakan yang mendorong keberadaan guru yang bermutu. Salah satu kebijakan yang dikembangkan oleh pemerintah di banyak negara adalah kebijakan intervensi langsung menuju peningkatan mutu dan memberikan jaminan dan kesejahteraan hidup guru yang memadai. Beberapa negara yang mengembangkan kebijakan ini bisa disebut antara lain Singapore, Korea Selatan, Jepang, dan Amerika Serikat. Negara-negara tersebut berupaya meningkatkan mutu guru dengan mengembangkan kebijakan yang langsung mempengaruhi mutu dengan melaksanakan sertifikasi guru. Guru yang sudah ada harus mengikuti uji kompetensi untuk mendapatkan sertifikat profesi guru (Widoyoko, 2008).

Selain dari faktor guru, sarana dan prasarana juga merupakan faktor yang berpengaruh terhadap mutu pendidikan. Sarana prasarana pendidikan yang baik akan menunjang keberhasilan pembelajaran sehingga menghasilkan *output* yang baik pula. Sarana prasarana yang memadai harus memenuhi ketentuan minimum yang ditetapkan dalam standar sarana prasarana agar terselenggaranya proses pendidikan secara efektif dan efisien.

Untuk mengetahui secara persis besarnya pengaruh faktor-faktor tersebut di atas terhadap mutu pendidikan, maka penulis akan menganalisisnya pada jenjang pendidikan tingkat menengah. Karena pendidikan tingkat menengah di Indonesia menjadi penting dipelajari mengingat setidaknya sekitar 80% dari anak-anak usia,

asumsikan antara 16-18 tahun, berkesempatan untuk memperoleh pendidikan, baik pendidikan umum maupun pendidikan kejuruan. Dalam perspektif pemenuhan pemerataan pendidikan, target jumlah anggota masyarakat usia SLTA yang dapat mengecap pendidikan adalah sebesar 80%, sementara di Sumatera Barat persentase daftaran murid usia 16-18 tahun baru mencapai sekitar 40% (BPS, 2000). Hal ini mengindikasikan perlunya program perluasan pendidikan jenjang menengah secara lebih tepat dan efektif.

Pendidikan menengah merupakan tahap pendidikan menjelang memasuki dunia kerja atau jenjang pendidikan yang lebih tinggi, baik itu pendidikan lanjutan umum maupun pendidikan lanjutan kejuruan. Terdapat perbandingan antara pendidikan umum dan pendidikan kejuruan, jika pendidikan umum dapat melanjutkan pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi atau memperoleh gelar sarjana, pendidikan kejuruan justru akan dapat langsung masuk ke dunia kerja (Elfindri, 2004:64-65). Manning dalam Elfindri (2004) secara konsisten memperlihatkan bahwa secara relatif daya serap angkatan kerja yang memiliki latar belakang kejuruan relatif lebih tinggi dibandingkan dengan umum. Selain dari itu kesejahteraan tenaga kerja juga memperlihatkan kecenderungan bahwa tamatan pendidikan kejuruan secara relatif lebih baik dibandingkan dengan pendidikan umum.

Data SUSENAS tahun 2001 untuk maksud yang sama dan untuk kondisi di Sumatera Barat. Hasil analisis menunjukkan tingkat pengembalian investasi individu dari pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) lebih besar daripada pendidikan SMU (Sekolah Menengah Umum). Hal ini terjadi disebabkan

karena lulusan SMK memang lebih diarahkan untuk memasuki dunia kerja daripada lulusan SMU. Lulusan SMK telah memiliki keterampilan dan keahlian khusus yang telah mereka pelajari semasa sekolah sehingga terjadi efisiensi dalam proses memasuki dunia kerja dengan keahlian khusus yang mereka miliki tersebut. Tentu saja hal ini dapat menjadi pertimbangan bagi rumah tangga atau individu, pemerintah dan pihak yang berkepentingan terkait dengan peningkatan mutu dan kualitas sumber daya manusia Indonesia dan Sumatera Barat khususnya untuk lebih memperhatikan lagi ke arah mana sebaiknya investasi peningkatan sumber daya manusia itu dilakukan (Elfindri, 2004).

Karena secara tegas, bukti empiris telah menemukan bahwa pengembalian SMK lebih tinggi bila dibandingkan pengembalian umum, sekalipun sudah dikontrol menurut tempat tinggal dan jenis kelamin. Ini menunjukkan kecenderungan pentingnya pengembangan pendidikan *vocational* sebagai salah satu alternatif perluasan kesempatan belajar, di tingkat pendidikan menengah, untuk memasuki dunia kerja. Dengan temuan tersebut, jelaslah kiranya perlu ada upaya untuk mengembangkan dan meningkatkan mutu pendidikan kejuruan. Atas dasar realita tersebut, maka penulis memilih untuk meneliti SMK.

Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2005 Tentang Standar Pendidikan Nasional, yang menjelaskan bahwa:

"Pendidikan menengah kejuruan adalah pendidikan pada jenjang pendidikan menengah yang mengutamakan pengembangan kemampuan siswa untuk jenis pekerjaan tertentu."

Dan Undang-Undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan pendidikan kejuruan merupakan

pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat bekerja dalam bidang tertentu. Pendidikan kejuruan merupakan bagian dari sistem pendidikan yang mempersiapkan lulusannya memiliki bekal yang cukup guna bekerja di perusahaan serta menguasai satu bidang pekerjaan dari sekian banyak bidang pekerjaan lainnya.

SMK menjadi salah satu komponen pendidikan tingkat menengah yang patut dikembangkan untuk menyiapkan sumber daya manusia yang cukup potensial. Saat ini dan di masa-masa mendatang, jumlah lapangan kerja industri terbilang minim jumlahnya, sementara jumlah pengangguran lebih banyak. Berdasarkan data yang penulis dapatkan dari Direktorat Pembinaan SMK tahun 2015, pertumbuhan jumlah SMK mengalami pertumbuhan yang cukup pesat, sebesar 9.164 sekolah pada tahun 2010 menjadi 11.708 sekolah pada tahun 2013 atau tumbuh sebesar 27,69%.

Melihat peluang besar dan peran penting sekolah kejuruan dalam upaya penyiapan tenaga kerja siap pakai untuk menekan tingkat pengangguran dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia, perubahan paradigma penyelenggaraan pendidikan kejuruan mulai dilakukan. Perubahan paradigma tersebut terjadi pada orientasi pendidikan dan pelatihan kejuruan yang dikembangkan dari yang bersifat *supply driven* menjadi *demand driven*. Murid di SMK lebih ditekankan untuk melakukan praktik sehingga mereka berpengalaman dan mantap untuk langsung memasuki dunia kerja. Hingga tahun 2008, Pemerintah telah berhasil meningkatkan rasio peserta didik SMK : SMA menjadi 46 : 54, dibandingkan pada akhir tahun 2004 sebesar 30 : 70.

Peningkatan sebesar 16% ini dicapai melalui ekstensifikasi dan intensifikasi penyelenggara pendidikan kejuruan berbagai bentuk SMK. Dalam hal pendanaan, anggaran untuk SMK juga dialokasikan lebih banyak dari SMA, yaitu untuk Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM) SMK sebesar Rp.175 milyar pada tahun 2007 dan Rp.209 milyar pada tahun 2008; sedangkan untuk BOMM SMA sebesar Rp.94 milyar pada tahun 2007 dan Rp.85 milyar pada tahun 2008. Bantuan khusus murid SMK, dengan alokasi anggaran Rp.328 milyar pada tahun 2008, sedangkan untuk SMA sebesar Rp.242 milyar.

Data PROPENAS (2007) menunjukkan bahwa 20% (antara 9,93%-36,28%) tamatan sekolah kejuruan yang dapat terserap di dunia usaha/dunia industri (DU/DI). Data dari pengguna lulusan (perusahaan) menyatakan bahwa karyawan yang direkrut (berasal dari SMK) ternyata baru sekitar 49,6% yang sesuai dengan bidang keahliannya. Ini berarti, lebih dari 50% karyawan yang direkrut oleh perusahaan yang merupakan tamatan SMK belum menunjukkan *performance* yang baik dalam bidangnya. Kenyataan tersebut menunjukkan bahwa tamatan SMK yang sudah diterima masih perlu mendapat *training* dan pelatihan khusus sebelum terjun berproduksi dan pelayanan jasa tertentu sesuai tuntutan DU/DI.

Pemerintah dalam hal ini perlu memberikan perhatian khusus terhadap kuantitas dan kualitas pendidikan kejuruan, karena lulusan SMK memiliki keterampilan dan keahlian untuk diserap di dunia lapangan kerja dan ini dapat membantu pemerintah dalam upaya mengurangi pengangguran. Namun, dari hasil pengamatan di lapangan mengindikasikan sebagian besar lulusan SMK kurang mampu menyesuaikan diri dengan perubahan atau perkembangan ilmu

pengetahuan dan teknologi. Artinya kompetensi yang mereka miliki belum sesuai dengan tuntutan dunia kerja. Hal ini menunjukkan bahwa proses penyiapan tamatan SMK selama di sekolah belum memiliki akurasi dan ketepatan dalam memahami instruksi dan petunjuk kerja yang telah terstandar.



Mutu lulusan pendidikan kejuruan sangat erat kaitannya dengan proses pelaksanaan pembelajaran yang dipengaruhi oleh banyak faktor, antara lain kurikulum, tenaga pendidik, proses pembelajaran, sarana dan prasarana, alat bantu dan bahan, manajemen sekolah, lingkungan sekolah dan lapangan latihan kerja siswa. Terkait dengan beberapa penelitian sebelumnya yang juga membahas tentang mutu pendidikan. Dalam penelitian ini faktor yang digunakan diantaranya adalah sarana prasarana, rasio guru-murid, guru bersertifikasi, dan pengalaman mengajar guru. Dunia pendidikan SMK belum sepenuhnya dapat memenuhi harapan masyarakat, fenomena ini ditandai dengan rendahnya mutu lulusan. Kualitas lulusan pendidikan kurang sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja, serta keadaan di beberapa SMK dimana pada saat praktikum, bahan praktik yang digunakan sudah ketinggalan dan tidak di-*update* sesuai dengan perkembangan teknologi. Sebagai contoh, dalam bidang otomotif kenyataan menunjukkan bahwa mobil atau motor yang digunakan teknologinya sudah ketinggalan. Tentu kondisi ini dapat mengakibatkan lulusan SMK kurang maksimal dalam bekerja di dunia industri.

Terkait dengan hal tersebut, penulis ingin mengetahui dan melihat pencapaian kualitas lulusan SMK di Kabupaten Sijunjung jika dilihat dari aspek-aspek di atas. Kualitas sumber daya manusia sangat bergantung pada kualitas

pendidikan. Proses belajar mengajar yang berkualitas akan berpengaruh terhadap prestasi atau hasil belajar siswa yang merupakan salah satu indikator kualitas atau mutu pendidikan. Rois (2007) menyatakan bahwa hasil belajar adalah nilai tingkat pencapaian belajar siswa yang diukur dengan skor. Ujian Nasional merupakan bentuk penilaian yang dilakukan pemerintah.

Dalam studi ini, penulis telah melihat hasil Ujian Nasional SMK tingkat Provinsi Sumatera Barat tahun ajaran 2014/2015. Data didapatkan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sijunjung, tercantum bahwa SMK di Kabupaten Sijunjung menempati peringkat 14 dari 18 Kota atau Kabupaten yang ada di Provinsi Sumatera Barat. Peringkat ini mengalami penurunan jika dibandingkan dengan dua tahun yang lalu, pada tahun ajaran 2012/2013 dan 2013/2014, SMK Sijunjung menempati peringkat 10. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hasil Ujian Nasional SMK Sijunjung berada dalam kategori terendah. Padahal salah satu indikator untuk melihat tingkat mutu pendidikan adalah dari rekapitulasi hasil Ujian Nasional. Maka dari data tersebut bisa dikatakan bahwa kualitas atau mutu SMK di Kabupaten Sijunjung belum bagus.

Berdasarkan fenomena yang diungkapkan di atas, maka dirasakan penting upaya dalam peningkatan mutu pendidikan SMK, khususnya di Kabupaten Sijunjung melalui penelitian ilmiah. Dengan demikian, akan diperoleh data secara akurat dan dapat dipertanggung-jawabkan.

1.2 Perumusan Masalah

Dari data rekapitulasi hasil Ujian Nasional SMK tingkat provinsi Sumatera Barat tahun ajaran 2014/2015 terlihat bahwa mutu lulusan SMK di Kabupaten Sijunjung mengalami penurunan jika dibandingkan dengan lulusan pada tahun ajaran 2012/2013 dan 2013/2014. SMK Kabupaten Sijunjung berada di peringkat 14 pada tahun ajaran 2014/2015, sedangkan pada tahun ajaran 2012/2013 dan 2013/2014 SMK Kabupaten Sijunjung menempati peringkat 10. Salah satu indikator mutu pendidikan SMK dilihat dari lulusannya. Untuk itu, penulis perlu melakukan suatu kajian lebih mendalam dan menganalisis secara lebih detail berdasarkan uraian yang dikemukakan di atas. Adapun rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaruh rasio guru/murid, sarana prasarana, guru bersertifikasi, dan pengalaman mengajar guru terhadap mutu pendidikan SMK di Kabupaten Sijunjung?
2. Apa kebijakan yang akan dilakukan pemerintah untuk meningkatkan mutu pendidikan SMK di Kabupaten Sijunjung?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab rumusan masalah yang diajukan, yaitu:

1. Menganalisis pengaruh rasio guru/murid, sarana prasarana, guru bersertifikasi, dan pengalaman mengajar guru terhadap mutu pendidikan SMK di Kabupaten Sijunjung.

2. Mengusulkan perbaikan kebijakan yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan mutu pendidikan SMK.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, sebagai berikut:

1. Secara teoritis hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan dunia pendidikan khususnya dalam perencanaan bidang pendidikan terutama dalam kaitannya dengan konsep peningkatan mutu lulusan di tingkat pendidikan SMK.
2. Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan akan dapat memberikan masukan bagi:
 - 1) Kepala sekolah dan Ketua Program Studi dalam meningkatkan mutu SMK di Kabupaten Sijunjung.
 - 2) Bagi stakeholders bidang pendidikan di daerah penelitian ini sebagai bahan acuan dalam penyusunan dan implementasi perencanaan pendidikan dalam membuat kebijakan terkait peningkatan mutu pendidikan SMK dan peningkatan partisipasi dunia usaha dan dunia industri agar lulusan tertampung di dunia kerja.

- 3) Bagi para peneliti lain sebagai bahan referensi untuk meneliti lebih mendalam dalam rangka pengembangan keilmuan, khususnya dalam bidang perencanaan pendidikan.

1.5 Sistematika Penulisan

Draft tesis ini terdiri dari 7 bab dengan susunan sebagai berikut. Bab 1 yang merupakan pendahuluan berisi 5 subbab yang menjelaskan latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

Bab 2 memaparkan teori-teori mengenai fungsi produksi dan konsep pendidikan, yang dibagi kepada 5 subbab yaitu: (1) pendekatan teori, (2) studi literatur pendidikan, (3) penelitian sebelumnya, (4) hipotesa penelitian, dan (5) kerangka analisis.

Bab 3 berisi paparan mengenai metode yang digunakan dalam penelitian yang dibagi kepada 4 subbab yaitu: (1) lokasi penelitian, (2) data dan sumber data, (3) metode analisis, dan (4) definisi operasional variabel.

Bab 4 memaparkan gambaran umum daerah penelitian yang dibagi ke dalam 4 subbab yaitu: (1) kondisi geografis, (2) kondisi demografis, (3) kondisi perekonomian, dan (4) kondisi pendidikan di Kabupaten Sijunjung.

Bab 5, 6 dan 7 membahas hasil dari penelitian, implikasi kebijakan, dan penutup yang berisikan kesimpulan dan saran dari penelitian.